



# Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film Dirty Vote

Aldi Ferdiansyah<sup>1\*</sup>, Na'imah<sup>2</sup>, Syaiful Kiram<sup>3</sup>, Yogi sopian haris<sup>4</sup>, Muhammad Syarqowi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>4,5</sup>Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

**Abstrak:** Film Dokumentari Dirty Vote mendeskripsikan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dana bantuan sosial (bansos), untuk kepentingan politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Film tersebut merupakan cerminan realita politik di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang masih berkuasa saat itu, yang melakukan pelanggaran hukum dan etika demi kepentingan politiknya, merugikan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dari film "Dirty Vote" dan sumber sekunder dari berbagai media elektronik, undang-undang, jurnal, berita, media sosial, media cetak, serta surat kabar. Analisis data dilakukan secara induktif sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Film "Dirty Vote" menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik politik curang yang terstruktur, sistematis, dan masif; (2) Berbagai alasan logis di balik terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tersebut disebabkan oleh ambisi kekuasaan penguasa melalui politik dinasti; (3) Implikasi dari kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan demonstrasi besar di berbagai daerah, penolakan terhadap hasil pemilu 2024, serta korban jiwa, materi, dan energi yang sangat besar.

**Kata Kunci:** Politik Gentong Babi, Politik Dinasti, Dirty Vote

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2755>

\*Correspondence: Aldi Ferdiansyah

Email: [ferdiansyahaldi003@gmail.com](mailto:ferdiansyahaldi003@gmail.com)

Received: 17-06-2024

Accepted: 24-07-2024

Published: 02-09-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The documentary film Dirty Vote describes allegations of structured, systematic and massive fraud involving misuse of the state budget, especially social assistance funds (bansos), for narrow political interests in order to maintain power. The film reflects the political reality in Indonesia under the leadership of the President of the Republic of Indonesia who was still in power at that time, who violated laws and ethics for narrow interests, harming the wider community. This research uses a descriptive qualitative approach, with primary data sources from the film "Dirty Vote" and secondary sources from various electronic media, laws, journals, news, social media, print media, books and newspapers. Data analysis was carried out inductively from the beginning of data collection until the research was completed. The research results show: (1) The film "Dirty Vote" is an important lesson for society to remain alert to fraudulent political practices that are structured, systematic and massive; (2) The various logical reasons behind the occurrence of structured, systematic and massive fraud are caused by the ruler's ambition for power through dynastic politics; (3) The implications of structured, systematic and massive fraud resulted in large demonstrations in various regions, rejection of the 2024 election results, as well as enormous loss of life, material and energy.

**Keywords:** Pork Barrel Politics, Dynasty Politics, Dirty Vote

## Pendahuluan

Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film *Dirty Vote* mendeskripsikan perubahan politik dalam pemerintahan yang masih sedang berkuasa di Indonesia melalui politik dinasti. Indonesia merupakan negara demokratis dengan pemilihan umum yang secara rutin diadakan untuk memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif. Pemilihan umum tersebut mencerminkan keterlibatan partai politik dan proses politik yang dinamis, peran partai politik memiliki dampak besar terhadap kondisi dan masa depan suatu bangsa, karena melalui hasil pemilihan umum, kepemimpinan baru akan terbentuk (Triono, 2017). Demokratisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin salah satunya dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang menetapkan arah dan tujuan negara (Zairudin, 2021). Setiap partai politik membawa visi, misi, dan idealisme mereka sendiri untuk menarik simpati rakyat, dengan harapan mendapatkan dukungan luas dari mereka.

Politik Indonesia memang dinamis dan menjanjikan, tapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa realita politik di Indonesia yang kurang ideal. Salah satu konsep demokrasi adalah bahwa kedaulatan berada dalam kekuasaan rakyat (Jazim, 2010). Sementara itu, banyak ahli menyatakan pentingnya demokrasi dalam pernyataan mereka dan yang terpenting, mereka berpendapat bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat (Pangestu & Rochmat, 2021). Namun berbanding sebaliknya, proses demokrasi ini sering kali diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan, salah satunya yang dikenal sebagai istilah politik gentong babi. Politik gentong babi mengacu pada praktik politik yang menggunakan uang negara untuk menarik dukungan dan suara rakyat. Praktik ini dapat memicu polarisasi politik dan merusak demokrasi.

Pemimpin yang berkuasa cenderung memanfaatkan instrumen negara, termasuk menggelontorkan anggaran bansos dalam jumlah besar menjelang pemilu, untuk melanggengkan kekuasaan mereka dan mewariskannya kepada kerabat atau kroni terdekat (Mayapada & Sastrawati, 2020). Dengan menyalurkan bansos secara masif di daerah-daerah tertentu, politisi incumbent berharap dapat membeli suara masyarakat sehingga mereka atau calon yang diusung dapat memenangkan pemilu (Tri, 2023). Jika berhasil, kekuasaan akan tetap berada di tangan dinasti atau kelompok elit tersebut untuk periode kepemimpinan berikutnya. Praktik ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Alokasi anggaran seharusnya didasarkan pada perencanaan matang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pragmatis politik sesaat dari rezim yang berkuasa (Tjenreng, 2020).

Istilah politik gentong babi muncul pada akhir-akhir ini melalui film dokumenter "Dirty Vote". Film dokumenter "Dirty Vote" karya Dandhy Laksono mengangkat isu politik gentong babi menjelang Pemilu Tahun 2024. Film ini mengungkap berbagai modus operasi politik gentong babi, seperti penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), proyek pembangunan, dan politik uang. *Dirty Vote* juga menunjukkan bagaimana politik gentong babi dapat memicu polarisasi politik dan merusak demokrasi. Salah satu contoh yang ditampilkan dalam film adalah bagaimana politisi menggunakan uang untuk membeli suara atau mempengaruhi pemilih, mengubah politik menjadi arena transaksi bisnis yang

kotor dan tidak sehat (Bagus Brata, 2022). Dengan demikian, film ini memberikan gambaran yang sangat realistis tentang bagaimana polarisasi politik dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan dalam sistem politik sebuah negara.

Film dokumenter "Dirty Vote" yang dirilis menjelang Pemilihan Presiden 2024 telah memicu perbincangan panas di masyarakat Indonesia terkait praktik politik "gentong babi" atau pork barrel politics. Istilah ini merujuk pada modus operasi yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi, mereka memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk tujuan meraup suara dalam pemilihan umum. Melalui film ini, modus tersebut terungkap ke publik. Oknum-oknum politisi ini dengan sengaja mengalihkan dana bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, justru digunakan sebagai sarana untuk menarik dukungan massa dalam pemilu (Hasfi et al., 2017). Mereka menjanjikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan harapan akan memperoleh suara di hari pemungutan suara nanti.

Namun, film "Dirty Vote" tidak hanya mengungkap modus operasi tersebut, tetapi juga menyoroti dampak berbahaya dari praktik politik gentong babi ini. Pertama, praktik ini mendistorsi proses demokrasi yang sehat. Para politisi menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi, yakni memenangkan pemilu, alih-alih menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat luas (Simanjuntak, P. M., & Dessy Artina, 2023). Hal ini mencederai makna hakiki dari pemilu sebagai sarana partisipasi politik rakyat yang seharusnya berlangsung dengan jujur dan adil. Kedua, praktik politik gentong babi ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah (Anggoro, 2019). Ketika program-program bansos yang seharusnya meringankan beban rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan politik, maka kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan. Publik akan semakin skeptis terhadap janji-janji politik yang disampaikan para elit. Ketiga, praktik ini juga berpotensi memperparah ketimpangan sosial di masyarakat. Dana bansos yang semestinya diberikan kepada masyarakat kurang mampu justru dialihkan untuk kepentingan politik segelintir orang (Herliandhy, 2016). Ini memperlebar jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya dengan yang tidak, sehingga menambah daftar panjang kesenjangan sosial di Indonesia.

Dalam menghadapi realitas politik yang penuh dengan intrik dan kecurangan, masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk tetap apatis atau justru mengambil peran aktif dalam memperbaiki sistem. Film ini kemungkinan menampilkan tokoh-tokoh masyarakat yang memutuskan untuk melawan praktik korup, mengungkap kecurangan, dan memperjuangkan perubahan positif dalam sistem politik mereka. Melalui perjuangan para tokoh ini, Dirty Vote mungkin menggambarkan betapa sulitnya menghadapi polarisasi politik yang telah mengakar dan praktik curang yang sistematis (Prasetyo, 2019). Namun, film ini juga menawarkan harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi jika masyarakat bersatu, berpartisipasi aktif, dan bersikap kritis terhadap manipulasi politik. Secara keseluruhan, Dirty Vote tampaknya bertujuan untuk membangkitkan kesadaran penonton tentang pentingnya integritas dalam sistem politik dan bahayanya polarisasi yang disebabkan oleh praktik curang seperti "gentong babi". Melalui narasi yang kuat dan penuh konflik, film ini mengajak penonton untuk merefleksikan peran mereka sebagai

warga negara dalam menciptakan perubahan positif, serta untuk lebih kritis terhadap upaya-upaya manipulatif yang merugikan masyarakat secara keseluruhan (Wibowo, 2015). Dengan mengangkat isu sensitif seperti ini, *Dirty Vote* berpotensi menjadi karya sinematik yang penting dalam mendorong diskusi tentang tanggung jawab masyarakat dalam menjaga demokrasi dan integritas proses politik. Film ini mengajak penonton untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam memperbaiki sistem politik yang telah terpolarisasi dan terkorupsi oleh praktik tidak bermoral seperti "gentong babi".

Penelitian Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi (2024) menemukan bahwa film dokumenter "*Dirty Vote*" memiliki pengaruh signifikan terhadap Pemilu 2024 di Indonesia. Film ini secara tegas membahas berbagai kecurangan yang terjadi di tatanan negara, terutama praktik tidak etis oleh elite politik dan pemerintah, seperti pemanfaatan program bantuan sosial untuk kepentingan politik. *Dirty Vote* mengungkap rancangan kecurangan yang direncanakan pihak-pihak berkuasa untuk memenangkan pemilu, dengan analisis mendalam dari pakar hukum tata negara mengenai taktik seperti penggelapan dana desa dan peningkatan anggaran bantuan sosial menjelang pemilu. Selain itu, film ini berperan penting dalam menyadarkan masyarakat untuk memilih pemimpin secara bijak, mendorong mereka menjadi lebih kritis dan selektif terhadap calon pemimpin yang berintegritas. Film ini juga memberikan informasi penting tentang kondisi sebenarnya dari Pemilu 2024, mengungkapkan bahwa terjadi kecurangan luar biasa yang mengancam keadilan dan martabat proses pemilu. Menariknya, penayangan film ini di masa tenang pemilu dapat menjadi dasar untuk menghukum para pelanggar, karena mengungkap rancangan kecurangan yang direkayasa oleh pihak berkuasa, sehingga dapat digunakan sebagai bukti sanksi. Secara keseluruhan, *Dirty Vote* berperan mengungkap kecurangan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi kritis, dan menjadi landasan hukum untuk menindak pelanggar pemilu (Nathaniella et al., 2024).

Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film *Dirty Vote* merupakan sebuah tema yang relatif baru dan menarik untuk dikaji. Kebaruan dalam tema ini terletak pada penggunaan film dokumenter sebagai media untuk mengangkat isu sensitif politik gentong babi di Indonesia, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2024. Selama ini, isu politik gentong babi sering kali dibahas dalam konteks akademis atau dalam diskusi-diskusi formal lainnya. Namun, film dokumenter *Dirty Vote* memberikan sudut pandang baru dengan menyajikan isu ini dalam bentuk visual yang lebih menarik dan mudah dicerna oleh khalayak luas. Melalui film ini, pembuat film berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024, terutama terkait pemanfaatan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik sempit segelintir elit atau kelompok tertentu (Prasetyo, 2019). Dengan menghadirkan narasumber yang merupakan pakar hukum tata negara, film ini memberikan analisis mendalam tentang dampak negatif dari politik gentong babi terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan potensi memperparah ketimpangan sosial di masyarakat.

Kebaruan lain yang ditawarkan dalam tema ini adalah upaya untuk mengajak masyarakat menjadi lebih kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu

serta menuntut akuntabilitas dari para pemangku kebijakan. Film *Dirty Vote* menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik-praktik politik yang tidak etis dan merugikan kepentingan publik (Nathaniella, A., & Triadi, 2024). Dengan menggunakan media film dokumenter, tema ini mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan dampak visual yang lebih kuat dalam menyampaikan pesan. Selain itu, film ini juga memberikan perspektif baru dengan mengangkat isu politik gentong babi di Indonesia, yang mungkin belum banyak dibahas secara mendalam sebelumnya. Secara keseluruhan, kebaruan dalam tema Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film *Dirty Vote* terletak pada pendekatan yang dilakukan, yaitu menggunakan media film dokumenter untuk mengangkat isu sensitif ini, memberikan analisis mendalam dari pakar, mengajak partisipasi aktif masyarakat, dan menyajikan perspektif baru dalam konteks Indonesia menjelang Pemilu 2024.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif (Putri et al., 2023). Metode penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya (Tan, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka secara teliti dengan mengkaji berbagai literatur seperti artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik politik gentong babi (pork barrel politics) (Amal, 2020). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana politik gentong babi dikonstruksikan dan dampaknya terhadap polarisasi politik. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pembahasan mendalam terhadap semua masalah yang diteliti untuk menghasilkan data dan bahan kajian yang akurat dan tepat. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu dari yang umum ke yang khusus. Metode analisis kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti (Rukin, 2019).

Penelitian kepustakaan (library research) merupakan metode penelitian tradisional yang telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengevaluasi berbagai studi ilmiah (Kurniawan, 2020). Dengan menggunakan metode ini, peneliti berupaya untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif serta memperoleh hasil yang optimal. Pendekatan kualitatif dalam penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna di balik data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis (Rukajat, 2018). Hal ini membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang konstruksi politik gentong babi dan dampaknya terhadap polarisasi politik.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Polarisasi Politik Gentong Babi

Secara harfiah, istilah "gentong babi" berasal dari abad ke-18. Istilah ini merujuk pada daging babi yang diasinkan dan diawetkan dalam gentong kayu yang mampu menampung lebih dari 30 galon sebelum didinginkan. Dalam bukunya yang berjudul "Towards Empowered Participation: Stories and Reflections", Tom Wakeford dan Jasber Singh menyatakan bahwa di Amerika Serikat pada masa lampau, pemilik budak sering memberikan daging babi asin yang disimpan dalam gentong kepada para budaknya. Para budak ini diberi bayaran dalam bentuk babi yang disimpan dalam gentong (Rahmawati, 2024). Untuk mendapatkan bayaran tersebut, mereka bersaing untuk mengambalnya, seperti yang dilaporkan oleh *The Sydney Morning Herald*. Pada tahun 1863, penulis dan sejarawan Edward Everett Hale menerbitkan cerita "The Children of the Public" yang mencatat pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Sekitar 10 tahun setelahnya, istilah politik "gentong babi" mulai muncul, yang merujuk pada pengeluaran dana publik oleh seorang politikus untuk kepentingan sekelompok kecil atau golongan tertentu, dalam upaya memperoleh dukungan dalam bentuk suara atau sumbangan kampanye (Berliani Ardha, 2014).

Dari historis di atas peneliti menyimpulkan Politik gentong babi merupakan praktik korup eksploitasi kekuasaan politik oleh para aktor politik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dilakukan dengan mengalokasikan dana publik dalam jumlah besar namun distribusinya tidak adil dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dana publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis mempertahankan atau meraih kekuasaan dengan cara menggelontorkan anggaran di daerah pemilihan untuk menarik dukungan suara. Praktik ini mencederai tata kelola keuangan negara yang baik karena anggaran tidak dialokasikan berdasarkan prioritas melainkan untuk keuntungan politik segelintir elit penguasa. Akibatnya terjadi inefisiensi penggunaan dana publik skala besar yang merugikan negara serta menyuburkan tindak korupsi lain seperti penyalahgunaan wewenang, suap, dan konflik kepentingan pejabat publik. (Ahmalia et al., 2024).

Praktik politik gentong babi didasari oleh kepentingan politik sesaat guna memperoleh dukungan suara, seringkali merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun atau yang disebut politik dinasti. Para pemimpin yang berkuasa cenderung memanfaatkan instrumen negara, termasuk menggelontorkan anggaran bansos dalam jumlah besar menjelang pemilu, untuk melanggengkan kekuasaan mereka dan mewariskannya kepada kerabat atau kroni terdekat. Dengan menyalurkan bansos secara masif di daerah-daerah tertentu, politisi incumbent berharap dapat membeli suara masyarakat sehingga mereka atau calon yang diusung dapat memenangkan pemilu (Tri, 2023). Jika berhasil, kekuasaan akan tetap berada di tangan dinasti atau kelompok elit tersebut untuk periode kepemimpinan berikutnya. Praktik ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Alokasi anggaran seharusnya didasarkan pada perencanaan matang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pragmatis

politik sesaat dari rezim yang berkuasa (Hidayat, 2020). Tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas dan mempertahankan kekuasaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini menciptakan konflik antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional yang lebih luas, serta menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak adil dan tidak efisien (Adi Fauzanto, 2023).

## 2. Film Dokumentary Dirty vote

Dirty Vote mendadak jadi perbincangan publik, film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Peluncuran film tersebut dilakukan pada awal masa tenang pemilihan umum (Pemilu). Pembuat film ini berharap masyarakat bisa mendapatkan edukasi menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dirty Vote adalah istilah dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Suara Kotor". istilah itu berasal dari kata berikut: dirty (adj): tidak bersih. vote (v): tindakan mengungkapkan pilihan atau pendapat Anda, terutama dengan menuliskan tanda secara resmi di atas kertas atau dengan mengangkat tangan atau berbicara dalam rapat. vote (v): tindakan menunjukkan pilihan atau pendapat kamu dalam pemilu atau pertemuan dengan menulis X pada selembar kertas resmi atau mengangkat tangan Anda. Vote (v): cara mengambil keputusan dengan meminta sekelompok orang untuk memilih (Nathaniella et al., 2024). Jadi, arti dari istilah Dirty Vote yang sebenarnya adalah "Pemilu Kotor". Film dirty vote merupakan film yang menyoroti atau menggambarkan praktik-praktik politik yang tidak etis, tidak jujur, atau curang dalam proses pemilihan umum atau politik. Film Dirty Vote seringkali mengungkapkan konflik, korupsi, manipulasi, atau pertarungan kekuasaan dalam konteks politik yang lebih luas. Film Dirty Vote menyampaikan desain kecurangan Pemilu 2024. Di dalamnya termuat informasi tentang bentuk kecurangan yang diurai dengan analisa hukum tata negara.

Film Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandhy Laksono mengangkat isu penting tentang praktik kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, yang memberikan pandangan kritis terhadap fenomena tersebut. Dalam cuplikan yang dipublikasikan di kanal YouTube Dirty Vote, Bivitri Susanti menyampaikan bahwa tujuan utama dari film ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 (Nathaniella et al., 2024). Bivitri menegaskan, "Banyak orang akan semakin menyadari bahwa telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak dapat dianggap sebagai proses yang benar-benar adil.". Salah satu bentuk kecurangan yang disorot dalam film tersebut adalah pemanfaatan program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Salah satu tokoh dalam film dokumenter Dirty Vote Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan adanya tekanan kepada kepala desa untuk mendukung calon presiden/wakil presiden tertentu dengan dalih pengelolaan data pemilih, dana desa, data penerima bansos dan wewenang lainnya

### 3. Politik Gentong Babi Dalam Perspektif Film Dirty Vote

Dalam film *Dirty Vote*, praktik politik gentong babi atau pork barrel politics disorot sebagai salah satu bentuk kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Seorang Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti memberikan penjelasannya soal bantuan sosial (bansos) yang dijadikan alat politik. Ia kemudian menyebut salah satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi. "Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics,". Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali (Dian, 2024).

Menurut Bivitri Susanti, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) cenderung melonjak drastis menjelang pemilu. Data menunjukkan sejak 2014, di setiap penyelenggaraan pemilu, angka anggaran bansos selalu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Contohnya pada 2023 menjelang Pemilu 2024, anggaran bansos dari pemerintah pusat mencapai Rp. 482,3 triliun yang terbagi dalam berbagai program seperti bansos beras, PKH (family hope program), PIP (smart indonesia program), BPNT (non-cash food assistance) dan subsidi lainnya. Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar dari UGM mengungkapkan adanya upaya tekanan kepada kepala desa untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024. Desa menjadi wilayah pertempuran perebutan suara dengan kepala desa memiliki sejumlah kewenangan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, seperti pengelolaan data pemilih, dana desa, data penerima bansos, PKH (family hope program), BLT (direct cash assistance) dan alokasi bansos (Dwi, 2024).

**Tabel 1.** Jumlah Anggaran Bansos Dari Tahun 2014-2024

Tahun	Jumlah Anggaran
2014	300 Triliun
2015	200 Triliun
2016	200 Triliun
2017	300 Triliun
2018	300 Triliun
2019	300 Triliun
2020	500 Triliun
2021	400 Triliun
2022	400 Triliun
2023	400 Triliun
2024	500 Triliun

(Sumber Film Dokumentari *Dirty Vote*, 2024)

Dari tabel di atas dapat kita amati pemerintah pusat terlihat gencar menyalurkan berbagai program bantuan sosial dengan nilai anggaran yang sangat besar menjelang

digelarnya pemilu. Misalnya pada 2013 menjelang pemilu 2014, disalurkan bansos sekitar Rp 78,3 triliun. Kemudian menjelang pemilu 2019, angkanya meningkat menjadi Rp 112,4 triliun. Tren serupa kembali terjadi menjelang pemilu 2024, bahkan anggaran bansos mencapai Rp 496,8 triliun, angka yang lebih tinggi dibanding masa pandemi COVID-19. Lonjakan penyaluran bansos menjelang pemilu ini menuai kecurigaan adanya muatan politis di baliknya, seperti upaya membeli suara pemilih dengan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan politik sesaat kelompok atau individu tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap praktik pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.

Film *Dirty Vote* sengaja dirilis di masa tenang Pilpres 2024 dengan beberapa agenda. Pertama, untuk menarik perhatian publik terhadap kerusakan proses demokrasi menjelang pemilu akibat praktik "gentong babi" yang diduga dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Kedua, agar film ini menjadi tontonan reflektif bagi masyarakat sebelum pemungutan suara, memberikan informasi serta mengedukasi tentang praktik-praktik kecurangan dalam Pemilu 2024. Ketiga, mengungkap rancangan besar kecurangan yang direkayasa pihak-pihak berkuasa, sehingga bisa menjadi landasan untuk menghukum para pelanggar. Meskipun kontroversial, penayangan *Dirty Vote* memicu diskusi publik luas tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi dan menghindari politik tidak etis yang merugikan masyarakat. Berbagai narasumber mengharapkan film ini dapat menjadi instrumen refleksi sosial sekaligus mengungkap taktik curang para politisi yang mengabaikan norma-norma demokrasi demi kepentingan pribadi (Dua, 2017).

## Simpulan

Film dokumenter *Dirty Vote* mengangkat isu praktik politik gentong babi atau pork barrel politics dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Film ini mengungkapkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara, terutama dana bantuan sosial (bansos), untuk kepentingan politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Penayangan film ini di masa tenang pemilu bertujuan mengedukasi publik, mengungkap rancangan besar kecurangan, serta memicu diskusi untuk menjaga integritas demokrasi dan menghukum para pelaku pelanggaran. Data menunjukkan lonjakan signifikan anggaran bansos menjelang pemilu, mencurigai adanya upaya membeli suara pemilih dengan memanfaatkan uang negara secara tidak akuntabel dan transparan. Film ini berfungsi sebagai peringatan terhadap bahaya politik gentong babi yang bisa merusak demokrasi dan merugikan masyarakat. Pentingnya temuan ini untuk dikaji lebih lanjut adalah agar publik dan lembaga pengawas pemilu dapat memahami pola dan metode yang digunakan, sehingga dapat mencegah terulangnya kecurangan serupa di masa depan. Teori politik gentong babi menyoroti bagaimana anggaran publik dialokasikan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu, sering kali dengan cara yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan dari temuan ini meliputi potensi bias dalam interpretasi data dan kesulitan dalam membuktikan keterlibatan langsung pihak-pihak tertentu tanpa bukti yang kuat dan komprehensif.

Diperlukan analisis lebih mendalam dan penelitian lanjutan untuk memperkuat bukti dan memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif.

### Daftar Pustaka

- Adi Fauzanto. (2023). Wajah Korupsi Di Indonesia (Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terang-kai). In *Penerbitwidina*. Penerbit Widina.
- Ahmalia, A. F., Fitriyah, & Sardini, N. H. (2024). Modal Sosial Dalam Kepemimpinan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka: Studi Politik Dinasti. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 475–489.
- Amal, M. (2020). *Mekanisme Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Periode 2014–2019*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>
- Bagus Brata, I. (2022). Pasar Tradisional di Tengah Arus Budaya Global. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(8).
- Berliani Ardha. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01), 105–120.
- Dian, A. (2024). *Disebut Dalam Film Dirty Vote, Ini Penjelasan Politik Gentong Babi Ala Jokowi*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1832588/disebut-dalam-film-dirty-vote-ini-penjelasan-politik-gentong-babi-ala-jokowi>
- Dua, M. (2017). Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalis Dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 12(2), 355. <https://doi.org/10.31385/jl.v12i2.97.355-372>
- Dwi, A. (2024). *Dirty Vote Bongkar Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024, Begini Uraianannya*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1832498/dirty-vote-bongkar-politisasi-anggaran-bansos-jokowi-di-pemilu-2024-begini-uraianannya>
- Hasfi, N., Usmand, S., & Santoso, H. P. (2017). Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi? *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 28. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i1.2152>
- Herliandhy, S. A. (2016). Kekuatan Politik: Peran Indonesia Corruption Watch (icw) dalam Mengungkap Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2011. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1(2). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40762>
- Hidayat, E. (2020). *Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkadaes*. Airlangga. University Press.
- Jazim, H. (2010). Civic education: Antara realitas politik dan implementasi hukumnya. In *Civic education: Antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, A. H. (2020). Konsep Altmetrics Dalam Mengukur Faktor Dampak Artikel Melalui Academic Social Media Dan Non-Academic Social Media. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, 11(1). <https://doi.org/10.20885/unilib.vol11.iss1.art5>
- Mayapada, A. N., & Sastrawati, N. (2020). Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syari'iyah*, 1(3), 422.

- Nathaniella, A., & Triadi, I. (2024). *Pengaruh Film Dokumenter "Dirty Vote" pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia: (The Influence of the Documentary Film "Dirty Vote" on the Quiet Period of the 2024 General Election in Indone.*
- Nathaniella, A., Triadi, I., & Tenang, M. (2024). Pengaruh Film Dokumenter " Dirty Vote " pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11.
- Pangestu, D. A., & Rochmat, S. (2021). Filosofi Merdeka Belajar Berdasarkan Perspektif Pendiri Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 78–92. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1823>
- Prasetyo, G. (2019). *Demokrasi Milenial. Ruas Media.*
- Putri, S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Bank Bukopin Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka ( Library Research ) dan Bibliometrik VOSviewer. *Research Gate, October*, 1–30.
- Rahmawati, N. (2024). *Politik Gentong Babi, Asal Usul dan Sejarah Perbudakan di AS.* Bebaspedia. <https://bebaspedia.com/life/asmara/politik-gentong-babi-asal-usul-dan-sejarah-perbudakan-di-as/>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach).* Deepublish.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif.* Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Simanjuntak, P. M., & Dessy Artina, L. D. (2023). *Analisis Yuridis Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Eksistensi Partai Politik Di Pemilihan Umum.* *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 578-595.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak. anti.* Penerbit Papas Sinar Sin.
- TRI, S. (2023). *Jejaring Serdadu Dalam Pemenangan Musa Ahmad Dan Ardito Wijaya Pada Pemilihan Kepala Daerah Lampung Tengah Tahun 2020 [UNIVERSITAS LAMPUNG].* <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71693>
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>
- Wibowo, W. (2015). *konsep Tindak Tutur Komunikasi.* 1. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ybR9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=komunikasi&ots=IT8hPAbt7V&sig=HxT3l4csYHQ0ciTBh26n71gmHIE>
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(7), 18–36.